

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP

Tahun 2019



**DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi dan Kelembagaan	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	5
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Penetapan Tujuan dan Sasaran	11
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	15
2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama	18
2.6 Penetapan kinerja	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja tahun 2019	22
a. Program Prioritas dan Realisasi tahun 2019 (RPJMD)	25
b. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan DPPA 2019	26
c. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas tahun 2019	39
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dan 2019	44
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Penutup	49

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau tahun 2019 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Secara lengkap LKJIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Secara sistematis, laporan ini merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikitisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2016-2021. LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh stakeholders mengenai pencapaian Diskoperindag Kabupaten Berau.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga ditahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP Diskoperindag Kabupaten Berau tahun 2019 ini.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Tanjung Redeb, Februari 2020

Kepala Dinas,

Wiyati, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610121 198301 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap LKJIP memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Secara sistematis, laporan ini merupakan rangkaian dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan LKJIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan LKJIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan LKJIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; dan revaluasi dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas LAKIP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Koperindag Kabupaten Berau.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperindag Kabupaten Berau adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Berau. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau.

1.3 Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Dinas merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepda Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan UPTD;
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah membawahi:
 - Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam Koperasi;
 - Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4) Bidang Perindustrian, membawahi:
 - Seksi Agro dan Hasil Hutan;
 - Seksi Kimia, Logam dan Mesin ;
 - Seksi Elektronik dan Aneka.;
- 5) Bidang Bina Usaha Perdagangan, membawahi:
 - Seksi Perdagangan Dalam Negeri ;
 - Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- 6) Bidang Sarana perdagangan, membawahi:
 - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sarana Perdagangan;
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perdagangan;
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
- 7) UPTD
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional:

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Berau dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau antara lain:

a. Bidang Koperasi

Strategi Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diperlukan perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi dan produktivitas usahanya. Dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum isu strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- ✓ Terbukanya pangsa pasar global untuk produk Koperasi dan UMKM.
- ✓ Rendahnya daya saing produk KUMKM.
- ✓ Menurunnya citra jati diri Koperasi dan UMKM sebagai akibat adanya black market .
- ✓ Kebijakan perbankan yang belum memihak pada KUMKM (suku bunga relatif tinggi).
- ✓ Kemampuan SDM KUMKM yang belum memadai.
- ✓ Tingkat inflasi yang relatif tinggi.

b. Bidang Perindustrian

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perindustrian di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- ✓ Pengaruh yang paling nyata dari isu global tersebut adalah terbukanya pasar lokal dan adanya kesepakatan perdagangan antar kawasan seperti WTO, NAFTA, AFTA, ICFTA, merupakan isu strategis yang paling krusial saat ini. Terjadinya aliran barang – jasa maupun aliran informasi tanpa batas secara timbal balik antara negara negara anggota

kesepakatan termasuk Indonesia, dan ironisnya kejadian ini cenderung menekan perkembangan usaha industri kita. Isu strategis lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan Industri Nasional maupun di daerah adalah kecenderungan semakin maraknya black market, keamanan nasional yang tidak menentu, isu kepastian hukum dan isu lingkungan hidup, isu-isu ini dalam satu hal merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan industri, akan tetapi dalam kondisi serba keterbatasan, baik kemampuan SDM, keterbatasan sarana prasarana dan beberapa kebijakan nasional yang kurang kondusif bagi pengembangan industri nasional, justru isu-isu ini menjadi tantangan dan bahkan penghambat perkembangan pembangunan industri.

- ✓ Belum terwujudnya daya saing produk industri Kabupaten Berau dapat dilihat dari belum banyaknya produk industri yang menembus pasar luar negeri baik itu ASEAN maupun Internasional. Produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing. Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi. Jika kita lihat berdasarkan skala industri, Kabupaten Berau didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu belum berkembangnya diversifikasi produk dan desain produk industri kerajinan mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu ke itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.
- ✓ Disisi lain industri menengah dan besar banyak yang belum mampu memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan (industri hijau) yang meliputi pemilihan bahan baku, bahan penolong dan energi, proses produksi, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Padahal setiap industri wajib melaksanakan kegiatan produksi yang ramah terhadap lingkungan.

c. Bidang Perdagangan

Isu- isu strategis dalam pemberdayaan perdagangan di Kabupaten Berau sebagai berikut:

- ✓ Menjamurnya keberadaan Toko Modern, pada prinsipnya kita tidak bisa menolak permohonan perijinan pendirian toko modern tersebut selama toko tersebut bisa memenuhi semua persyaratan dan melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan.
- ✓ Kenaikan harga Bahan Pokok menjelang Hari Besar dan Keagamaan. Menjelang Hari Hari Besar dan Keagamaan terjadi Kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan yang dikarenakan volume kebutuhan masyarakat yang meningkat dan musim yang kurang mendukung. Hal ini ditindaklanjuti dengan operasi pasar atau pemantauan harga barang yang telah rutin dilakukan.
- ✓ Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen. Konsumen dan pelaku usaha secara nyata mempunyai hubungan yang saling membutuhkan, namun belum semua pelaku usaha menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan usaha yang diselenggarakannya. Dilain sisi adanya pelaku usaha yang nakal juga dipengaruhi oleh belum mengertinya konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Sementara itu disisi lain dengan adanya globalisasi perdagangan seharusnya kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mengerti haknya. Sehingga perjanjian ekonomi regional dan global tersebut tidak merugikan masyarakat kita.

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2017 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye yang telah diselaraskan dengan kajian teknokratik, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN**

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

- 1) Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 2) Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal
- 3) Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

- 4) Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Kinerja Dinas Koperindag Kabupaten Berau mengikuti misi kedua yaitu **Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.** Dinas Koperindag perlu membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan misi kedua tersebut. Di dalam misi tersebut terdapat indikator laju pertumbuhan ekonomi, Dinas Koperindag memiliki kontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan dan perindustrian, baik perindustrian besar maupun kecil menengah.

2.2 Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategik dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut:

Tujuan Pertama, Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian

Perekonomian dan sektor industri merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sektor Industri mengambil sebagian besar peran dalam hal peningkatan ekonomi daerah dengan cara menambah sumber pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan sektor industri secara otomatis akan meningkatkan pula perekonomian Kabupaten Berau. Dalam rangka mendorong

pertumbuhan industri, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

Tujuan kedua, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan

Dalam pembangunan ekonomi daerah sumber-sumber daya ekonomi yang utama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kondisi sumber-sumber daya ekonomi tersebut di tiap-tiap daerah pasti berbeda, yang akan berpengaruh kepada pola-pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi tersebut. Sumber daya yang dapat dijadikan produk unggulan perdagangan akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan perlu dilakukan upaya-upaya, salah satunya kemandirian perdagangan. Dalam rangka mewujudkan kemandirian perdagangan dengan cara menyediakan produk dalam negeri di pasaran yang sejenis dengan produk impor baik dari segi harga maupun kualitas, dengan harga terjangkau.

Tujuan ketiga, Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah

Peran Koperasi dan UMKM yang optimal dapat menjadi kunci berkembangnya suatu daerah. Hal ini dikarenakan Koperasi dan UMKM adalah lembaga utama penunjang perekonomian yang selalu membantu suatu daerah dengan cara mempromosikan produk unggulannya serta mengembangkan produk tersebut sehingga dapat menjadi komoditas ekspor daerah. Peningkatan peran koperasi salah satunya dengan cara Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/ kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

Tujuan pertama, Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian, dengan sasaran:

- Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dengan indikator: Jumlah industri kreatif

Tujuan kedua, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan dengan sasaran:

- Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau, dengan indikator: Nilai ekspor non migas Berau

Tujuan ketiga, Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah, dengan sasaran:

- Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM, dengan indikator: Jumlah Koperasi yang berprestasi.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

1) Industri berbasis sumber daya lokal

Kompetisi global yang semakin meningkat, mewajibkan setiap negara untuk mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya agar dapat bersaing dengan negara lain melalui penguatan daya saing industri yang memiliki kemampuan manajemen yang efisien, Optimalisasi industri dapat memunculkan banyak produk yang berkualitas di pasaran dengan harga yang bersaing. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang impor yang sejenis. Daya saing produk industri dapat memunculkan banyak produk yang berkualitas di pasaran dengan harga yang bersaing. Semakin bagus mutu barang dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat, maka produk lokal dapat bersaing sehat dengan barang impor yang sejenis

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal

- Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2) Peningkatan Aktivitas Perdagangan Lokal

Diversifikasi pasar dapat meningkatkan komoditas ekspor Kabupaten Berau. Produk-produk ekspor haruslah dapat dipilih oleh target pasaran sehingga mereka tidak terpaku hanya pada satu jenis komoditas melainkan komoditas tersebut mempunyai komoditas sejenis yang merupakan hasil inovasi dari produsen. Hal ini penting dilakukan mengingat suksesnya sebuah rantai perekonomian adalah tingkat kepuasan target pasaran produk. Kebijakan ekspor pada awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada di dalam negeri serta untuk mengeratkan hubungan dengan negara. Kemudian berkembang menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi negara di dunia internasional. Kabupaten Berau perlu mengembangkan sumberdaya lokal yang dapat dijadikan komoditi ekspor Kabupaten Berau.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan kinerja ekspor non migas Berau.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan aktivitas perdagangan local
- Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen

3) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia Koperasi dan UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Daya saing Koperasi dan UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan. Pemberian peran terhadap usaha skala mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu langkah mengembangkan dan mengoptimalkan potensi perekonomian Indonesia sehingga mampu mengangkat citra perekonomian rakyat.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi
- Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM
- Peningkatan sarana promosi produk daerah
- Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi

4) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berpengaruh pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*. Salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur organisasi, karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien, efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- Peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Optimalisasi Industri berbasis sumber daya lokal	Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal
			Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan	Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau	Peningkatan Diversifikasi pasar dan Produk Ekspor	peningkatan aktifitas perdagangan lokal
			Mengembangkan kerjasama perlindungan konsumen
			peningkatan promosi produk komoditi daerah
Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi
			Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM
			Peningkatan sarana promosi produk daerah
			Pembinaan dan peningkatan manajemen koperasi
		Peningkatan kapasitas kelembagaan	Peningkatan sarana prasarana dan standar operasional kantor
			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan

2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau menetapkan cara mencapai tujuan

dan sasaran melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kegiatan tahun anggaran 2019 adalah penjabaran dari pada program Diskoperindag Kabupaten Berau yaitu: Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan, Diskoperindag Kabupaten Berau menetapkan 11 (Sebelas) program dan 41 (Empat Puluh satu) Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - Sosialisasi Kinerja Program SKPD
 - Konsolidasi Perencanaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
 - Fasilitas Kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (CEFE)
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Pengembangan UMKM
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
 - Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi.
7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
 - Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
 - Forum Komunikasi SKA Bidang Perdagangan Luar Negeri
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Operasional Pasar
 - Pelaksanaan Pasar Murah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar
 - Pengembangan Pasar dan distribusi Barang/produk (DAK)
10. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah.
 - Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
 - Fasilitas Sertifikasi Halal
 - Dekranasda.

11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, seperti dijabarkan pada tabel berikut :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN / PERHITUNGAN	DATA TAHUN AWAL 2016	Target Akhir Tahun 2021
1	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang di kembangkan	IKM	Mengukur perkembangan industri berbasis sumber daya local	IKM didapat dari update data jumlah IKM yang terdaftar setiap tahun	880 IKM	1200 IKM
		Jumlah IKM yang Menggunakan Teknologi Industri	IKM	Mengukur perkembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	IKM didapat dari update data jumlah IKM yang terdata menggunakan teknologi industri setiap tahun	461 IKM	600 IKM
2	Meningkatnya kinerja ekspor non migas Berau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	USD	Mengukur peningkatan aktifitas perdagangan	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Berau	1.361.642.118,46	1.700.000.000,-
		PDRB Kab. Berau dari Sektor Perdagangan	%	Mengukur peningkatan aktifitas perdagangan	Peningkatan Nilai Kontribusi sektor perdagangan	5,9	6,2
3	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (UMKM)	Nilai	mengukur Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang UKM serta koperasi	jumlah didapat dari data wirausaha yang memiliki keunggulan kompetitif setiap tahun	192 UMKM	300 UMKM
		Jumlah UMKM yang dibina (UMKM)	Nilai	Peningkatan kemudahan akses permodalan KUMKM	jumlah di dapat dari data UMKM yang diberi bantuan dan binaan modal setiap tahun	24 IKM	150 UMKM

2.6 Penetapan Kinerja

Dengan didukung oleh sejumlah program dan kegiatan, selanjutnya dibuat Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melalui Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2019 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta Target yang akan dicapai sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU
TAHUN 2019**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya administrasi perkantoran	Bulan	12
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan dinas	Dokumen	6
3	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan	IKM	25
4	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi industri	IKM	30
5	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	% Rasio	185
6	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Tercapainya pengembangan ekspor		
7	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tercapainya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha	Kecamatan	1
8	Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif	Jumlah UMKM yang berjalan dengan baik	UMKM	260
9	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wira Usaha yang Memiliki Keunggulan Kompetitif (IKM)	IKM	122
10	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Koperasi	34

	Program	Anggaran
<u>1</u>	<u>Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	Rp 1,293,856,000.00
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 100,000,000.00
3	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 750,000,000.00
4	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp 230,000,000.00
5	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 15,635,811,000.00
6	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Rp 87,984,000.00
7	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 265,000,000.00
8	Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif	Rp 116,000,000.00
9	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 440,000,000.00
10	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 365,000,000.00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja tahun 2019

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM yang dijabarkan dalam 11 (dua belas) Program dan 41 (empat puluh satu) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

No	Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.553.339.800,00
	1)	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00
	2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.500.000,00
	6)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	116.043.800,00
	7)	Penyediaan jasa administrasi keuangan	174.156.000,00
	8)	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.500.000,00
	9)	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00
	10)	Penyediaan alat tulis kantor	22.500.000,00
	11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00
	12)	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.000.000,00

	13)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00
	14)	Penyediaan Peralatan rumah tangga	5.600.000,00
	15)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000,00
	17)	Penyediaan makanan dan minuman	31.000.000,00
	18)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00
	19)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000,00
	20)	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	573.540.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		5.000.000,00
	22)	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		182.634.000,00
	1)	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00
	10)	Konsolidasi Perencanaan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	157.634.000,00
	12)	Sosialisasi Kinerja Program OPD	20.000.000,00
15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif		116.000.000,00
	3)	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	116.000.000,00
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		295.000.000,00
	4)	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	295.000.000,00
16	Program pengembangan industri kecil dan menengah		865.000.000,00

	1)	Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	150.000.000,00
	7)	Fasilitas Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	600.000.000.00
	8)	Fasilitas Sertifikasi Halal	115.000.000.00
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		590.000.000.00
	6)	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	590.000.000.00
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		316.500.000.00
	5)	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	50.000.000.00
	9)	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	66.500.000.00
	12)	Pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah	200.000.000.00
17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		87.984.000.00
	13)	Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan Luar Negeri	81.984.000.00
17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		290.000.000.00
	1)	Pembinaan kemampuan teknologi industri	290.000.000.00
18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		16.478.119.000.00
	3)	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	4.481.811.000.00
	9)	Pelaksanaan Pasar Murah	2.100.000.000.00
	10)	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	161.950.000.00
	11)	Operasional Pasar	7.254.000.000.00
	12)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	1.280.358..000.00

	14)	Pembangunan Pasar Rakyat	1.200.000.000.00
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		450.000.000,00
	4)	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	100.000.000.00
	5)	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	350.000.000.00
Jumlah			21.229.576.800,00

a. Program Prioritas dan Realisasi Tahun 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten

Berau tahun 2016-2021

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Program Prioritas yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat pada tabel 2.2 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program Prioritas Tahun 2019

No	Program Prioritas (RPJMD)	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja		OPD	Realisasi
			2019	2021		2019
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (Jumlah Industri Kecil Menengah yang di kembangkan)	900	950	Diskoperindag	910
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	5	5,55	Diskoperindag	4,2

b. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan DPPA Tahun 2019

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2019 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 21.229.567.800,00 yang terbagi dalam 12 (sebelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 82,10% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp. **17.429.444.889,00**. Pencapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian **Sangat Baik**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan berserta capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.553.339.800,- dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp.1.486.286.056,00 dengan persentase 95,68%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas yang dapat dilihat pada tabel 3.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	2.967.500	84,79	200 surat keluar	216 surat keluar	108
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.500.000	153.475.476	95,03	12 bulan	12 bulan	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	116.043.800	97.973.211	84,43	21 unit	14 unit	66.67
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	174.156.000	166.776.000	95,76	21 orang	21 orang	100

5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.500.000	7.630.000	89,77	10 jenis	12 jenis	120
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000	9.999.500	100	10 jenis	9 jenis	90
	Penyediaan alat tulis kantor	22.500.000	22.499.000	100	20 jenis	18 jenis	90.00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	14.997.600	99,98	3 jenis	3 jenis	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	2.719.000	67,98	4 jenis	4 jenis	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	17.350.000	86,75	5 unit	5 unit	99.38
11	Penyediaan Perlengkapan rumah tangga	5.600.000	5.298.000	94,61	5 jenis	5 jenis	100
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000	7.920.000	99,00	2 bacaan	2 bacaan	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	31.000.000	25.653.000	82,75	2 jenis	2 jenis	100

13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000	298.576.319	99,53	26 kali	34 kali	130
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100.000.000	93.200.000	93,20	80 kali	121 Kali	151
15	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	573.540.000	559.250.950	97,51	14 orang	14 orang	100

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 182.634.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 174.946.016,00 dengan persentase 95,79%, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dengan output yang dihasilkan terdiri dari Renja 2019, RKA, DPA, LKj-IP, LPPD, dan Perjanjian Kinerja.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja yang berkualitas dengan manfaat yang diperoleh terpenuhinya dokumen perencanaan program dan pelaporan capaian kinerja sehingga tersedianya laporan dan realisasi SKPD yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	4.975.500	99,51	6 dok	6 dok	100
2	Konsolidasi perencanaan Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	157.634.000	149.970.516	95,14	15 kali	18 kali	120
3	Sosialisasi Kinerja Program OPD	20.000.000	20.000.000	100	1 Paket	1 Paket	100

3. Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Konduksif

Pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang konduksif yang dianggarkan sebesar Rp. 116.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.113.396.860,00 dengan persentase 97,76 %, Target kinerja kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada 60 UKM yang ada di Kabupaten Berau untuk kemudahan pembuatan Izin Usaha.

Sampai dengan 31 Desember 2019 target tersebut tercapai sebesar 112%. Sosialisasi dilakukan ke 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung dan Gunung Tabur, dimana masing-masing Kecamatan

dihadiri oleh sedikitnya 20 UMKM yang ada, sehingga total UMKM yang difasilitasi adalah 132 UMKM. yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif sebagai berikut :

Tabel 3.5
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	116.000.000	113.396.860	97,76	24 UMKM	30 UMKM	125

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.590.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.536.156.929,00 dengan persentase 90,87% yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang terfokus pada pelatihan Wirausaha dan Pembentukan Badan Usaha, mulai dari Perencanaan, Akses Permodalan, Pembuatan Proposal Permodalan, Prosedur dan Tata Kerja Administrasi dan Akuntansi Wirausaha dll. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal bulan Maret 2019 di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, Jalan Murjani I Tanjung Redeb.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 24 UKM di Kabupaten Berau, dan target tersebut tercapai sepenuhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.6**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah**

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	590.000.000	536.156.929	90,87	24 UMKK	24 UMKM	100

**5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah**

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.316.500.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.110.694.636,00 dengan persentase 34,97% yang bertujuan untuk memberikan dukungan pendanaan/modal dan sarana promosi bagi UMKM di Kabupaten Berau. Dengan target capaian sebanyak 100 UMKM Kegiatan ini mencapai 94%.

Program ini mencakup 3 kegiatan yang saling mendukung dan bersinergi guna mewujudkan pencapaian target kinerja yang diinginkan. Kegiatan ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.7 Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pemantauan Pengelolaan dana Pemerintah Bagi UMKM	50.000.000	27.112.330	54,22	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Penyelenggaraan promosi Produk UMKM	66.500.000	66.377.801	99,82	15 Produk	26 Produk	173,3
3	Penge- mbangan UMKM	200.000.000	17.204.505	8,60	30 UMKM	24 UMKM	80

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.320.454.000,00 dengan persentase 71,21% yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Lembaga koperasi di Kabupaten Berau melalui pencapaian RAT koperasi Dengan target capaian sebanyak 76 koperasi.

Adapun sasaran pada program ini adalah meningkatkan angka koperasi yang berhasil RAT pada akhir tahun 2019, dari 80 koperasi yang ditargetkan RAT, angka yang di capai pada akhir tahun adalah sebanyak 76 koperasi. Capaian kinerja program ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

Tabel 3.8

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	100.000.000	78.122.250	78,12	24 Koperasi	24 Koperasi	100
2	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	350.000.000	242.331.750	69,24	80 Koperasi	76 Koperasi	95

7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan yang dianggarkan sebesar Rp.295.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.210.989.993,00 dengan persentase 71,52% yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang terhadap 1.440 alat UTP. Kegiatan ini mencapai lebih dari 100% dengan pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai lebih dari 1.440 alat UTP yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Operasionaslisasi dan pengembangan UPTD Kemetrolagian Daerah	295.000.000	210.989.993	71,52	1.440 alat UTTP	1.440 alat UTTP	100

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor yang dianggarkan sebesar Rp.87.984.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.81.229.414,00 dengan persentase 92,32% yang bertujuan untuk meningkatkan angka ekspor komoditas dan meningkatkan angka investasi yang ditanamkan di Kabupaten Berau.

Sasaran dari program ini adalah terselesaikannya laporan PEPIDA dan terlaksananya Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri. Kedua sasaran yang diakomodir dalam dua kegiatan ini terlaksana seluruhnya (100%) yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 3.10

Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Forum Komunikasi SKA bidang perdagangan luar negeri	87.984.000	81.229.414	92,32	3 Rakor	3 Rakor	100

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp.16.478.119.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.13.002.082.654,00 dengan persentase 78,91% yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada sarana perdagangan di Kabupaten Berau. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana di pasar-pasar pada 13 Kecamatan di Kabupaten Berau, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.11 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel 3.11

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (DAK)	4.481.811.000	3.897.147.414	86,95	2 Pasar	2 Pasar	100

2	Pelaksanaan Pasar Murah	2.100.000.000	99.856.885	4,76	8 Kecamatan	9 Kecamatan	113
3	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	161.950.000	133.732.729	82,58	12 Laporan	12 Laporan	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Operasional	1.280.358.000	1.117.604.452	87,29	2 pasar	2 pasar	100
5	Pasar	7.254.000.000	6.782.316.748	93,50	2 pasar	2 pasar	100
6	Pembangunan Pasar Rakyat	1.200.000.000	971.424.426	80,95	1 Pasar	1 Pasar	100

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

10. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yang dianggarkan sebesar Rp.865.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.730.894.712,00 dengan persentase 84,50% yang bertujuan untuk kualitas dan daya saing Industri kecil dan Industri menengah yang ada di Kabupaten Berau. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil menengah dalam promosi produk dan peningkatan daya saing yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.12 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	150.000.000	129.781.216	86,52	15 IKM	15 IKM	100
2	Fasilitasi Dekranasda	600.000.000	541.938.496	90,32	5 Produk	10 Produk	200
3	Fasilitasi Sertifikasi Halal	115.000.000	59.175.000	51,46	12 IKM	12 IKM	100

11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang dianggarkan sebesar Rp.290.000.000,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.286.875.100,00 dengan persentase 98,92% yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung peningkatan pemasaran bagi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Berau. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan IKM binaan dalam penggunaan teknologi industri, serta Kemasan yang memadai dan menunjang kegiatan pemasaran industri kecil menengah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.13 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri sebagai berikut :

Tabel 3.13
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	290.000.000	286.875.100	98,92	10 IKM	12 IKM	120

c. Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2019 berdasarkan RPJMD

Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau melaksanakan Program Prioritas yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran Strategis ini dicapai melalui dua program prioritas. Program Prioritas yang Pertama Yaitu Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.14 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Capaian Program/Kegiatan Prioritas Industri Tahun 2019
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	150.000.000	129.781.216	86,52	15 IKM	15 IKM	100
2	Fasilitasi Dekranasda	600.000.000	541.938.496	90,32	5 Produk	10 Produk	200
3	Fasilitasi Sertifikasi Halal	115.000.000	59.175.000	51,46	12 IKM	12 IKM	100

Program Prioritas yang Kedua yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.15 Program Prioritas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Capaian Program/Kegiatan Prioritas Perdagangan Tahun 2019
Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk (DAK)	4.481.811.000	3.897.147.414	86,95	2 Pasar	2 Pasar	100
2	Pelaksanaan Pasar Murah	2.100.000.000	99.856.885	4,76	8 Kecamatan	9 Kecamatan	113
3	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	161.950.000	133.732.729	82,58	12 Laporan	12 Laporan	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Operasional	1.280.358.000	1.117.604.452	87,29	2 pasar	2 pasar	100
5	Pasar	7.254.000.000	6.782.316.748	93,50	2 pasar	2 pasar	100
6	Pembangunan Pasar Rakyat	1.200.000.000	971.424.426	80,95	1 Pasar	1 Pasar	100

d. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 80,33%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau. Berdasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- Sulitnya pemenuhan data kebutuhan masyarakat yang ada pada Bidang Bina Usaha Perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau. Salah satu contohnya adalah data Beras, Diskoperindag Kabupaten Berau hanya mempunyai data beras yang berasal dari luar daerah Kabupaten Berau saja, dan tidak mempunyai data beras yang beredar di pasaran yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Berau itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dihitung;
- Data Ekspor yang ada di Diskoperindag Kabupaten Berau dalam hal ini Bidang Bina Usaha Perdagangan hanya meliputi data Ekspor yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Data ini hanya mewakili sekitar 60% data ekspor yang sesungguhnya ada di Kabupaten Berau. Selain itu, data SKA sebagian besar adalah data ekspor Migas. Sehingga tidak valid untuk digunakan sebagai perhitungan target capaian kinerja sektor Ekspor Kabupaten Berau apabila target kinerja yang diminta adalah data ekspor non migas;
- Tidak terpenuhinya target persiapan Gedung UPTD Metrologi pada tahun 2018 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan Kemetrolgian
- Tidak tersedianya dana Bimbingan Teknis bagi pelaksana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, sementara kebutuhan akan

bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat di atasi.

- Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Subbag Penyusunan Program dan urusan Perkoperasian, Perdagangan serta Perindustrian menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang di rencanakan, serta dalam hal peningkatan sarana pelayanan public
- Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

b. Solusi

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Data Ekspor dapat dipenuhi apabila data yang dicantumkan tidak terbatas pada non migas, karena Ekspor yang tercapat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) sebagian besar merupakan data Ekspor MIGAS.
- Target kinerja untuk menghitung pencapaian keberhasilan disektor wirausaha, sebaiknya menggunakan perhitungan yang lebih dapat dihitung, seperti pengukuran keberhasilan wirausaha berdasarkan omset yang dihasilkan, lapangan kerja yang disediakan, jumlah tenaga kerja yang terserap dsb.
 - o Pada tahun 2019, Kegiatan Operasional dan Administratif pada UPTD Metrologi Legal dilakukan di bangunan sementara yang bersifat kontrak / sewa melalu APBD Kabupaten Berau.
- Diperlukan dukungan dana dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan teknis
- Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menungjang kinerja OPD
- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.

3.2 Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

Melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD yang dilaporkan pada setiap triwulan pada tahun berjalan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten berau melakukan evaluasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra periode 2016-2021, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 80,33%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau. Berdasarkan Perbup No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih mengalami kendala dan permasalahan antara lain :

- Sulitnya pemenuhan data kebutuhan masyarakat yang ada pada Bidang Bina Usaha Perdagangan yang mencakup seluruh kebutuhan pokok yang ada dan digunakan oleh masyarakat Kabupaten Berau. Salah satu contohnya adalah data Beras, Diskoperindag Kabupaten Berau hanya mempunyai data beras yang berasal dari luar daerah Kabupaten Berau saja, dan tidak mempunyai data beras yang beredar di pasaran yang berasal dari dalam daerah Kabupaten Berau itu sendiri. Hal ini berlaku juga untuk barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga presentase pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dihitung;
- Data Ekspor yang ada di Diskoperindag Kabupaten Berau dalam hal ini Bidang Bina Usaha Perdagangan hanya meliputi data Ekspor yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Data ini hanya mewakili sekitar 60% data ekspor yang sesungguhnya ada di Kabupaten Berau. Selain itu, data SKA sebagian besar adalah data ekspor Migas. Sehingga tidak valid untuk digunakan sebagai perhitungan target capaian kinerja sektor Ekspor Kabupaten Berau apabila target kinerja yang diminta adalah data ekspor non migas;

- Tidak terpenuhinya target persiapan Gedung UPTD Metrologi pada tahun 2018 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan Kemetrologian
- Tidak tersedianya dana Bimbingan Teknis bagi pelaksana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengakibatkan minimnya kegiatan peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia, sementara kebutuhan akan bimbingan dan semakin cepatnya pembaharuan informasi tidak dapat di atasi.
- Kurangnya SDM yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada Subbag Penyusunan Program dan urusan Perkoperasian, Perdagangan serta Perindustrian menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan.
- Kurangnya dukungan dana untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang di rencanakan, serta dalam hal peningkatan sarana pelayanan public
- Pagu anggaran setiap tahun masih sangat minim

b. Saran

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau ada beberapa solusi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Data Ekspor dapat dipenuhi apabila data yang dicantumkan tidak terbatas pada non migas, karena Ekspor yang tercapat melalui Surat Keterangan Asal (SKA) sebagian besar merupakan data Ekspor MIGAS.
- Target kinerja untuk menghitung pencapaian keberhasilan disektor wirausaha, sebaiknya menggunakan perhitungan yang lebih dapat dihitung, seperti pengukuran keberhasilan wirausaha berdasarkan omset yang dihasilkan, lapangan kerja yang disediakan, jumlah tenaga kerja yang terserap dsb.
 - o Pada tahun 2019, Kegiatan Operasional dan Administratif pada UPTD Metrologi Legal dilakukan di bangunan sementara yang bersifat kontrak / sewa melalu APBD Kabupaten Berau.
- Diperlukan dukungan dana dalam peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan teknis

- Diperlukan tambahan SDM dengan keahlian yang sesuai untuk menunjang kinerja OPD
- Agar inovasi layanan dapat berjalan maksimal perlu disediakan anggaran yang memadai sesuai peruntukannya baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
- Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Berau mohon untuk dapat di prioritaskan pagu anggaran yang memadai setiap tahunnya.